**STRATEGI INDONESIA DALAM MENANGGAPI RESOLUSI PARLEMEN UNI
EROPA NO. P8_TA(2017)0098 TENTANG PALM OIL AND DEFORESTATION OF
RAINFOREST TAHUN 2017**

**Oleh: Maya Bonita
(mayabonita1996@gmail.com)
Pembimbing: Irwan Iskandar, SIP. MA**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Parliament of the European Union issued a resolution on palm oil in April 2017. The resolution is titled Palm Oil and Deforestation of Rainforest. The resolution is considered discriminatory against palm oil because it recommends other vegetable oils that are no more efficient than palm oil. The discrimination of palm oil has been going on for a long time, but this time the Uni European-level issued the resolution. This is contrary to the principles established by the European Union so far as the champion of open, rules-based free, and fair trade.

This research uses Library Research method. The data is obtained from the official website of the relevant institutions both from Indonesia and the Parliament of the European Union. Using the perspective of Mercantilism, the level of Country-Nation analysis and Competitive Advantage Theory proposed by Michael E. Porter and the Concept of National Interest.

Indonesia as the world's largest palm oil producer feels very disappointed with the issuance of the resolution. Moreover, Indonesia has strived to create the Palm Oil Industry that is compatible with sustainable development. Indonesia needs a special strategy so that the resolution is not implemented because it will have a political impact and a bad image on the European Union countries and other countries due to restrictions on palm oil. However, Indonesia is not alone. Indonesia along with other palm oil producing countries unite to fight the resolution and show the facts through a positive campaign that palm oil is a more efficient, effective and sustainable type of vegetable oil. Finally, the use of palm oil is continued and there is no discrimination and the European Union will only increase the use of renewable energy to 32% by 2030.

Keywords : Palm Oil, Vegetable Oil, European Parliament, Mercantilism Perspective, Resolution

I. Pendahuluan

Negara anggota Uni-Eropa merupakan negara yang banyak menggunakan minyak nabati sebagai energi salah satunya adalah *biofuel* yang menggunakan *Crude Palm Oil* sebagai bahan campuran. *Crude Palm Oil* di produksi oleh negara agraris seperti

Indonesia, bahkan Indonesia merupakan negara dengan ekspor CPO terbesar ke Uni-Eropa. Ekspor CPO Indonesia memenuhi kebutuhan Uni-Eropa selain *Rapeseed Oil* dan *Sunflower Oil* yang merupakan produksi negara-negara Uni – Eropa tersebut. Uni Eropa mengimpor CPO guna memenuhi kebutuhan minyak

nabati untuk berbagai sektor. Minyak Kelapa sawit adalah minyak nabati dengan konsumsi terbanyak kedua setelah *Reseped Oil* di Uni-Eropa¹. Konsumsi yang besar membuktikan bahwa minyak kelapa sawit sangat dibutuhkan di Uni-Eropa.

Perjalanan ekspor-impor selama ini Indonesia - Uni Eropa memiliki banyak dinamika termasuk adanya *Black Campaign* yang dilakukan oleh negara-negara Uni-Eropa. Institusi turut ambil posisi dalam kebijakan yang mempersulit ekspor CPO Indonesia ke Uni-Eropa. Perlakuan diskriminatif selanjutnya adalah adanya Resolusi Parlemen Eropa tersebut terhadap Minyak Kelapa Sawit.

Resolusi Parlemen Eropa tentang *Palm Oil and Deforestation of Rainforests* yang disahkan melalui pemungutan suara pada sesi pleno di Strasbourg pada tanggal 4 April 2017 mencerminkan tindakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit. Dalam voting resolusi sawit bahwa 640 anggota setuju, 28 abstain, dan 18 menolak. Tindakan diskriminatif ini berlawanan dengan posisi Uni Eropa sebagai *champion of open, rules based free, and fair trade*². Resolusi tersebut mengagendakan penghapusan penggunaan minyak kelapa sawit pada tahun 2020. Negara yang berdampak besar terhadap resolusi ini salah satunya adalah Indonesia yang merupakan produsen terbesar Minyak kelapa sawit dunia terutama di Uni-Eropa.

1 Novelli, Emanuelle. *Sustainability as a Success Factor for Palm Oil Producers Supplying the European Vegetable Oil Markets*. OIL PALM INDUSTRY ECONOMIC JOURNAL VOL. 16 (1) MARCH 2016 dimuat dilaman http://www.meo-carbon.com/wp-content/uploads/GRAS_OPIEJ_291116.pdf diakses pada 20 februari 2018

2 *Tanggapan atas Resolusi Parlemen eropa tentang Minyak sawit*. Dimuat dilaman <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Tanggapan-Atas-Resolusi-Parlemen-Eropa-Tentang-Minyak-Sawit-.aspx> diakses pada 3 Februari 2018

Resolusi tersebut menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia menyebabkan deforestasi dan kebakaran hutan³. Parlemen Uni-Eropa berpendapat bahwa industri Minyak Kelapa sawit melanggar Hak Asasi Manusia dan standard sosial dikarenakan adanya kasus pekerja anak serta konflik pembebasan lahan dengan masyarakat lokal. Ditambah dengan pernyataan bahwa produk kelapa sawit Indonesia diperoleh dari hasil Deforestasi yang besar. Pertanian merupakan sektor yang menyumbangkan 29% dari deforestasi dengan menyoroti tanaman dengan tingkat deforstasi tinggi yakni kedelai (19%), jagung (11%), Kelapa sawit (8%), Beras (6%), Tebu (5%)⁴. Dengan luas lahan kelapa sawit sebanyak 16 juta hektare (ha) di seluruh dunia, deforestasi akibat kelapa sawit hanya menyumbang delapan persen terhadap deforestasi dunia. Sementara itu, di sisi lain, deforestasi yang diakibatkan oleh kacang kedelai menyumbang 19 persen diforestasi dunia⁵. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat minyak nabati selain minyak kelapa sawit yang menyebabkan deforestasi.

Nama Indonesia dicantumkan dalam resolusi tersebut hal ini tentu saja merugikan bagi Indonesia. Resolusi ini

3BKSA Serukan Parlemen Uni Eropa Tinjau

Ulang Resolusi Sawit. Dimuat dilaman <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16522/t/BKSA+Serukan+Parlemen+Uni+Eropa+tinjau+ulang+Resolusi+Sawit> diakses pada 5 Maret 2018

4 Victor Baron, Alain Rival And Raphael Marichal. *No, palm oil is not responsible for 40% of global deforestation* di muat dilaman <https://phys.org/news/2017-06-palm-oil-responsible-global-deforestation.html> diakses pada 18 februari 2018

5 Gumelar, Galih. *Resolusi Sawit Uni-Eropa disinyalir persaingan dagang*. Dimuat dilaman <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170509135906-92-213466/resolusi-sawit-uni-eropa-disinyalir-karena-persaingan-dagang> diakses pada tanggal 8 februari 2018

secara gamblang mengatakan bahwa *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*, *Indonesian on Sustainable Palm Oil (ISPO)*, *Malaysian on Sustainable Palm Oil (MSPO)* tidak efektif dalam menjalankan tugasnya terhadap pelerangan hutan hujan yang ubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Studi LMC International, sebuah lembaga riset dari Inggris menyebutkan, untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati (vegetable oil) dunia pada 2025, apabila menggunakan tanaman "*Rapeseed*" membutuhkan tambahan lahan 50,5 juta ha, Jika dipenuhi oleh tanaman minyak matahari (*sun flower*) membutuhkan tambahan lahan 70,4 juta ha sedangkan jika Kelapa Sawit hanya memerlukan 12,6 ha⁶. Hal tersebut membuktikan bahwa minyak kelapa sawit lebih efektif daripada *Repeseed Oil* dan *Sunflower Oil*. Komoditi sawit adalah satu-satunya potensi minyak nabati yang berkelanjutan dan memiliki dampak besar terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat kecil di negara-negara penghasil produk Kelapa sawit. Apabila tidak ada sawit, kebutuhan dunia akan minyak nabati harus digantikan oleh perluasan lahan pertanian rapeseed atau kedelai yang mencapai 5-10 kali lebih besar dari perluasan sawit⁷.

Produksi Kelapa sawit lebih efisien baik waktu maupun harga karena tersedia sepanjang tahun dan harga yang lebih murah. Indonesia merupakan negara Agraris dimana Perkebunan dan Pertanian adalah faktor pembentuk ekonomi utamanya. Indonesia menjadi produsen

6 Alasan kenapa minyak kelapa sawit tidak bisa dilarang di Uni Eropa dimuat dilaman http://www.bpdp.or.id/article-Ini_Alasan_Mengapa_Sawit_Tak_Bisa_Dilarang_d_i_Eropa.html diakses pada 6 mei 2018

7 Sadewo,Joko. CPOPC : Uni Eropa Diskriminatif soal sawit Indonesia. 29 November 2017 dimuat dilaman <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/11/29/p06ah2318-cpopc-uni-eropa-diskriminatif-soal-sawit-indonesia> diakses pada 21 januari 2018

utama dalam pemenuhan kebutuhan *Crude Palm Oil/CPO* dunia. Kelebihan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia merupakan potensi besar Indonesia menjadi negara pengekspor komoditi kelapa sawit dunia. Karena itu Indonesia melakukan strategi guna menanggapi resolusi tersebut agar tidak berdampak pada industri kelapa sawit Indonesia.

Penelitian ini membahas mengenai strategi apa yang Indonesia lakukan guna melindungi sektor minyak kelapa sawit sebagai sektor penting non-migas Indonesia.

Berangkat dari uraian di atas, kerangka dasar teoritis yang akan penulis gunakan dalam kasus ini adalah National Interest (Economic and Political Interest). National Interest dikemukakan oleh Donald E Nuechterlein adalah sebuah teori dimana negara memiliki kepentingan untuk mewujudkan kehidupan berbangsanya masing-masing. Berfokus pada Economic and Political Interest. Menurut Mohtar Mas' oed ada lima kategori yang penting untuk diketahui dalam menentukan tingkat analisa dalam sebuah studi hubungan internasional, yakni perilaku individu, perilaku kelompok, negara-bangsa, dan system internasional⁸. Penelitian ini menggunakan level analisa negara-bangsa dimana negara sebagai pengambil keputusan tertinggi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni sebuah metode yang dilakukan dalam penelitian yang tidak melibatkan perhitungan. Metode dengan memperhatikan perilaku aktor-aktor internasional dengan menghubungkan sebab-akibat yang terjadi dengan menggunakan teknik kepustakaan yang bersifat eksplanatif secara induktif yang akan berusaha untuk mengungkapkan dan menganalisa fenomena atau kejadian terkait dengan permasalahan yang diteliti.

8 Mohtar Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Metodologi*. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES Indonesia. Hal.41

Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Library Research*. Data-data sekunder didapat dari studi pustaka (*Library research*) seperti buku, jurnal, makalah, skripsi, surat kabar, majalah, dokumen maupun bahan lainnya. Dalam ruang lingkup penjelasannya, Strategi Indonesia dalam menanggapi Resolusi Uni Eropa tentang *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* tahun 2017 agar penelitian tidak melebar maka peneliti mengambil ruang lingkup berupa Indonesia sebagai Objek penelitian. Hal ini menjangkau mengenai Strategi yang dilakukan oleh Indonesia untuk menanggapi resolusi tersebut pada tahun 2017.

II. Pembahasan

Sejarah dan Perkembangan Industri Kelapa Sawit

Industri kelapa sawit adalah salah satu issue yang menarik dikarenakan cepatnya perkembangan serta persaingan yang tinggi di pasar global minyak nabati. Indonesia sangat unggul dalam bidang perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit, dimana perkebunan minyak kelapa sawit tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit Indonesia berada pada pelosok 190 kabupaten di Indonesia.⁹ Jumlah perusahaan perkebunan sawit mencapai 1.320 perusahaan, 74 industri minyak goreng, 46 industri margarin *shortening*, 44 industri detergen dan sabun, 37 industri oleokimia, dan 20 industri biodiesel¹⁰. Selain perekonomian domestik, sektor ini

9 PASPI. *Industri nyak sawit Indonesia Menciptakan pendapatan Dunia lebih dari USD \$100 Miliar pertahun*. Vol.1 no.7 tahun 2015 diakses di <http://paspimonitor.or.id/monitor-archives/>

10Dunia Industri. *Data perkebunan sawit dan industri hilir terbesar didunia*. Dimuat dilaman <http://duniaindustri.com/downloads/data-perkebunan-sawit-dan-produsen-hilir-terbesar-dunia/> diakses pada 1 agustus 2018

membawa 190 kabupaten di Indonesia tersebut terhubung dengan berbagai negara dan pasar minyak nabati global.

Industri Kelapa Sawit memiliki perjalanan panjang dari masa kolonial hingga sekarang, dimulai pada tahun 1875. Hingga pada 1911 Belgia membuka perkebunan komersial pertama di Pulau Raja (Asahan, Sumut) dan Sungai Liput (Aceh) di ikuti selanjutnya oleh Jerman dan Belanda. Seiring berjalannya waktu Investasi asing mulai melirik sektor kelapa sawit yang mulai berkembang di Indonesia, terlebih pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang membuka peluang perundang-undangan liberalisasi ekonomi. Perkebunan milik negara mulai berkembang pada tahun 70-an dan masyarakat mulai berkembang pada tahun 1979 melalui bantuan dana dari Bank Dunia. Hingga kini Indonesia menjadi produsen utama dunia dalam sektor minyak kelapa sawit.

Peran Industri Kelapa Sawit

Pertumbuhan nilai perdagangan komoditi minyak nabati dunia telah mengalami peningkatan tajam dalam beberapa dekade terakhir. Pasar minyak nabati besar, meskipun kecenderungan penggunaan untuk bahan pangan dan Industri. Kecenderungan ini meningkat juga akibat dari menggunakan bahan energi alternatif. Menurut data PBB, pada tahun 2010 *Gross Domestic Product* (GDP) dunia adalah 47.920 milyar USD (2010). Dalam 23 tahun kedepan (tahun 2033) GDP dunia tersebut akan meningkat 2 kali lipat, dan dalam waktu yang lebih pendek, yakni 17 tahun berikutnya (2050), GDP dunia akan meningkat 3 kali lipat menjadi 148.191 milyar USD.¹¹ Peningkatan GDP ini akan berdampak pada peningkatan konsumsi minyak nabati global.

Kehadiran minyak kelapa sawit mengubah pasar minyak nabati terutama empat minyak nabati utama (*Palm Oil*,

11 GAPKI. *INDUSTRI MINYAK SAWIT INDONESIA MENUJU 100 TAHUN NKRI*. 2014. Dimuat di <https://gapki.id> diakses pada 5 mei 2018

Soybean Oil, Rapeseed Oil, Sunflower Oil). Minyak nabati sangat menjadi perhatian karena kebutuhan yang meningkat dan lahan yang dibutuhkan untuk produksinya juga sangat besar. Hal ini memberikan berbagai respon dari masyarakat Internasional. Sebagian besar masyarakat dunia telah menjadikan alasan bioenergi sebagai kambing hitam terhadap meningkatnya harga pangan dunia. Selain itu konversi lahan untuk produksi minyak nabati di berbagai negara tropis dunia dianggap sebagai salah satu katalisator kerusakan hutan. Kerusakan dan tekanan terhadap alih fungsi lahan di kawasan ini membawa dampak yang lebih nyata.

Lahan yang digunakan untuk memproduksi minyak nabati dibutuhkan lahan yang luas tergantung dari jenis minyak nabati itu sendiri. Lahan yang digunakan kian meningkat dari tahun ketahun dikarenakan bertambahnya kebutuhan minyak nabati untuk digunakan berbagai sektor salah satunya energi. Lahan yang digunakan untuk minyak nabati mengalami perkembangan yang berbeda-beda dengan minyak yang dihasilkan dengan jumlah yang berbeda.

Pada tahun 2014 lahan untuk palm oil hanya membutuhkan 10% dari total keseluruhan yakni 191 juta Ha. Dibandingkan dengan minyak nabati lainnya yakni *Rapeseed Oil* membutuhkan luas lahan 19% , *Soybean Oil* 58%, *Sunflower Oil* 13 % dari keseluruhan lahan yang digunakan untuk produksi minyak nabati. Hal ini membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak memberi dampak yang signifikan terhadap lingkungan dunia jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Minyak kelapa sawit dapat menjadi pilihan yang baik diantara minyak nabati lainnya, yang turut menyebabkan deforestasi secara besar-besaran terhadap dunia.

Palm Oil yang hanya menggunakan 10% lahan secara keseluruhan menghasilkan 41% minyak nabati, sementara minyak nabati *Rapeseed Oil* dengan menggunakan lahan sebanyak 19

% hanya menghasilkan 18% dari produksi seluruh minyak nabati dilanjutkan dengan *Sunflower Oil* menggunakan lahan 13% menghasilkan minyak nabati sebanyak 10% dan yang terakhir adalah *Soybean Oil* yang memerlukan lahan 58 % namun hanya menghasilkan 31%. Jika dilihat dari data tersebut tentu *Palm Oil* lebih efisien dan porsi lebih banyak. Minyak Kelapa sawit terus konsisten dan diminati karena harganya yang lebih murah dari minyak nabati lainnya tentu hal ini memberi keuntungan bagi negara-negara untuk lebih mengefektikan penggunaan minyak nabati dengan harga yang lebih murah. Secara umum, harga minyak nabati dunia tahun 2010-2015 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya permintaan minyak nabati dunia dan cenderung mengeser harga semakin tinggi. Fluktuasi yang terus terjadi menjadikan *Palm Oil* menjadi primadona bagi para konsumen minyak nabati dunia. Sesungguhnya kehadiran *Palm Oil* adalah membantu menjawab kebutuhan dunia akan minyak nabati yang efisien , tidak menyebabkan defortasi yang besar, produksi melimpah dan harga yang terjangkau. Kebutuhan pasar global ini membuat sektor minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang pendapatan negara lebih dari 15 milyar dollar pertahun dari total ekspor (3% dari GDP Indonesia).¹² Sehingga minyak kelapa sawit dapat menjadi solusi terbaik dalam market minyak nabati dunia.

Telah menjadi perhatian pemerintah dan global bahwa industri ini terus berkembang dan akan terus memerlukan lahan sehingga maraknya terjadi kebakaran hutan dan menyebabkan deforestasi. Indonesia berinisiatif untuk

12 Forest Watch Indonesia. *Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia [KERTAS POSISI]* dimuat dilaman <http://fwi.or.id/publikasi/industri-kelapa-sawit-berkelanjutan-indonesia/> diakses pada 28 mei 2018

melaksanakan sistem berkelanjutan dan tatakelola perkebunan kelapa sawit. Dimulai pada tahun 2008 Indonesia memulai membicarakan hingga tahun 2011 meresmikan *Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO* dan diperbaharui pada tahun 2015. ISPO adalah Sistem Sertifikasi yang diterapkan di Indonesia sebagai standart dan kektentuan dalam menjalankan Industri Kelapa Sawit.

Issue ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai produsen terbesar, eksportir terbesar dan lebih dari 16 juta pekerja bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit ini.¹³ Selain itu dinegara-negara konsumen seperti Uni Eropa issue ni telah menjadi issue publik baik pemerintah, parlemen maupun masyarakat mendorong terciptanya sistem yang mendukung pembangunan berkelanjutan dalam sektor minyak kelapa sawit. Pada tanggal 25 September 2015 lalu, dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dihadiri 193 anggota termasuk Indonesia, telah resmi diberlakukannya platform pembangunan global 2015-2030 yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals 2030* (SDGs 2030). Forum tersebut telah menyepakati 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dipenuhi oleh masing-masing negara anggota PBB baik melalui kerjasama, pembangunan berbagai sektor dalam negeri, daerah, dimana jika dikelompokkan 17 tujuan akan menjadi 3 kelompok yakni ekonomi sosial dan lingkungan hidup.

ISPO merupakan sebuah regulasi yang wajib untuk diterapkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sistem sertifikasi ISPO adalah serangkaian persyaratan yang

terdiri dari 7 (tujuh) prinsip, 34 (tigapuluh empat) kriteria dan 141 (seratus empat puluh satu) indikator yang mencakup isu hukum, ekonomi, lingkungan dan sosial, sebagaimana tertuang dalam Permentan No 11/2015, untuk perusahaan kelapa sawit yang terintegrasi kebun dan pengolahan.¹⁴ Hal tersebut dilakukan Indonesia untuk mencapai pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Resolusi Palm Oil And Deforestation of Rainforest

Minyak kelapa sawit telah memenuhi kebutuhan minyak nabati Uni-Eropa sejak lama, selama berlangsungnya proses perdagangan Internasional antara Uni-Eropa dan negara penghasil minyak kelapa sawit khususnya Indonesia telah banyak terjadi berbagai dinamika. Puncaknya terjadi perlakuan diskrimnasi terhadap minyak kelapa sawit oleh Parlement Uni-Eropa melalui sebuah resolusi yang menyebutkan nama Indonesia didalamnya. Resolusi tersebut bertajuk *Palm Oil and Deforestation of Rainforest*, dengan berbagai tuduhan yang ditujukan kepada Indonesia.

Resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen ini kontroversi terutama dinegara kawasan Asia Tenggara yang merupakan negara-negara penghasil utama minyak kelapa sawit. Salah satunya adalah Indonesia. Terdapat beberapa besar yang menjadikan resolusi ini menjadi sangat hangat diperbincangkan serta menimbulkan banyak pro dan kontra. Pertama adalah dilakukan sertifikasi tunggal untuk minyak kelapa sawit yang selama ini ditangani oleg RSPO,MSPO,ISPO tidak sesuai dan tidak dapat mengcover Deforestasi yang terjadi hal ini dilaksanakan pada tahun 2020.

13 Bahuet Christophe. *Sustainable Palm Oil for All*. 20 juni 2017. Dimuat dilaman <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2017/06/20/sustainable-palm-oil-for-all.html> diakses pada 29 Mei 2018

14 ISPO mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. dimuat dilaman <http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-479-ispo-mewujudkan-pembangunan-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan.html> diakses pada 1 agustus 2018

Kedua, penghapusan penggunaan minyak kelapa sawit secara bertahap dan digantikan dengan minyak nabati yang diproduksi oleh Uni-Eropa yakni Rapeseed oil dan Sunflower Oil pada tahun 2020. Dan Ketiga adalah Rekomendasi penggunaan minyak Rapeseed dan Minyak Bunga Matahari yang diproduksi oleh negara-negara Uni-Eropa sendiri, menurut data bahkan tidak lebih efektif dan membutuhkan lahan yang lebih luas dibanding minyak kelapa sawit dengan volume yang sama.

Uni-Eropa merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi dikawasan tersebut dikarenakan Uni-Eropa adalah *market* ketiga bagi Minyak kelapa sawit. Selain itu banyaknya investor yang berinvestasi di sektor ini, menjadikan Uni-Eropa merasa bertanggung jawab atas investasi yang mengalir menyebabkan deforestasi dan berbagai masalah lainnya. Uni-Eropa menganggap resolusi ini adalah solusi dari berbagai masalah dari Industri minyak kelapa sawit. Secara garis besar Resolusi ini menyiratkan bahwa minyak kelapa sawit tidak seharusnya digunakan secara besar-besaran. Resolusi menyerukan kepada UE untuk memperkuat langkah-langkah lingkungan untuk mencegah deforestasi terkait minyak sawit, dan mengakhiri penggunaan minyak kelapa sawit pada tahun 2020 sebagai komponen biodiesel.¹⁵ Kali ini berbeda karena resolusi dikeluarkan oleh lembaga sekelas Parlemen Uni-Eropa yang tentunya memiliki pengaruh yang sangat luas. Resolusi ini tentu akan mempengaruhi sikap negara-negara Uni-Eropa terhadap

15 European Parliament. *Palm oil: the high cost of cultivating the cheap vegetable oil*. 3 Juni 2017. dimuat dilaman <http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170306STO65231/palm-oil-the-high-cost-of-cultivating-the-cheap-vegetable-oil> diakses pada 30 mei 2018

minyak kelapa sawit yang selama ini dipergunakan diberbagai sektor

Upaya Indonesia dalam menanggapi Resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest*

A. Kampanye Internasional

Diskriminasi yang dilakukan sejak lama oleh berbagai institusi di negara-negara Uni-Eropa menyebabkan Indonesia mengambil langkah melakukan kampanye-kampanye positif yang bertujuan membuka mata dunia bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang layak dan Efisien dalam penggunaannya. EOPA adalah sebuah organisasi pelaku bisnis minyak kelapa sawit di Uni-Eropa. Organisasi ini bertujuan untuk menyampaikan terkait minyak kelapa sawit yang bermanfaat dan berkelanjutan di antara pemangku kepentingan di Uni-Eropa. EOPA bekerjasama dengan organisasi-organisasi diberbagai negara di Uni-Eropa, guna memfasilitasi komunikasi dan keseimbangan terkait nutrisi dan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

Parlemen Indonesia dalam hal ini DPR RI yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) melakukan analisis terkait resolusi yang dikeluarkan oleh parlemen Uni-Eropa. Setelahnya BKSAP dengan tegas menyampaikan agar parlemen Uni-Eropa Resolusi tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung kepada perwakilan Uni-Eropa saat dilakukan diskusi antar parlemen yang dilaksanakan pada 23 mei 2017 di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam forum tersebut Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menekankan, Indonesia adalah negara yang memiliki komitmen tinggi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Selanjutnya pada ASEAN – *European Union Senior Official's* adalah Kegiatan peringatan 40 tahun hubungan ASEAN- European Union, 50 tahun ASEAN dan 60 tahun Traktat Roma. Kegiatan ini dilaksanakan di Bangkok, thailand pada 5-6 Juli 2017. Pertemuan ini

diketahui bersama oleh H.E. Ms. Busaya Mathelin, Sekretaris Permanen dan Pemimpin SOM ASEAN dari Thailand dan H.E. Mr Gunnar Wiegand, Direktur Pelaksana untuk Asia dan Pasifik, Layanan Aksi Eksternal Eropa dan Pemimpin SOM Uni Eropa.¹⁶ Pertemuan ini sangat penting bagi ASEAN dan Uni Eropa yang merupakan rekan kerjasama dalam berbagai bidang.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Direktur Jendral Kerjasama ASEAN Jose Tavares sebagai ketua Delegasi Republik Indonesia, menegaskan mengenai sikap dan pentingnya minyak kelapa sawit bagi ASEAN.

Kampanye diforum WTO adalah salah satu upaya Indonesia. Indonesia memiliki kesempatan untuk Menginisiasi terlaksananya sebuah kegiatan pada *Publik Forum World Trade Organisation (WTO)* yang bertajuk “*Workshop on Sustainability and Non-Tariff Barriers to Trade: The Case Study of Palm Oil*”. Merupakan agenda tahunan untuk membahas Issue perdagangan yang sedang hangat dikalangan perdagangan Internasional. Dihadiri oleh berbagai pihak seperti pemerintah, pengusaha, lembaga penelitian, akademisi, parlemen dan lembaga swadaya masyarakat. Public Forum tahun ini mengambil tema “*Trade: Behind the Headlines*”, yang dihadiri oleh 1.500 peserta, dan terdiri dari 106 forum pembahasan berbagai isu perdagangan.¹⁷

16 Co-Chairs’ Press Release ASEAN-EU Senior Officials’ Meeting, 5-6 July 2017, Bangkok. 7 Juli 2017. Dimuat dilaman https://eeas.europa.eu/delegations/haiti/29521/co-chairs%E2%80%99-press-release-asean-eu-senior-officials%E2%80%99-meeting-5-6-july-2017-bangkok_en diakses pada 27 Juni 2018

17 Melawan Kampanye Negatif Palm Oil di Forum Perdagangan Internasional WTO, Jenewa-Swiss. 2 Oktober 2017. Dimuat dilaman <http://mission-indonesia.org/2017/10/02/melawan-kampanye-negatif-palm-oil-di-forum-perdagangan-internasional/> diakses pada 27 Juni 2018

Kegiatan yang dinisiasi Indonesia melalui Dubes WTO dan Atase Perdagangan di PTRI Jenewa didukung oleh negara-negara penghasil minyak kelapa sawit yakni Malaysia, Thailand, Guatemala, dan Colombia. Pada pembukaan kegiatan ini Wakil tetap RI yakni Duta Besar Hasan Kleib memaparkan fakta bahwa terjadinya diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit. Kampanye gencar dilakukan oleh Indonesia, salah satunya dilaksanakan di Berlin-Swiss. Kegiatan ini bertajuk Indonesian Business Forum “*Sustainable Palm Oil in Global Market*” dilaksanakan digedung Zunfthaus zur Meisen, Zurich, 28 September 2017.

Dihadiri oleh pihak Indonesia yang terdiri dari pemerintah dan gabungan pengusaha Industri kelapa sawit serta Swiss yang dihadiri oleh pengusaha dan pemerintah. Kegiatan ini merupakan suatu upaya untuk memberikan pengetahuan secara langsung kepada pemangku kepentingan bisnis di Swiss.

Pada 14 November 2017 dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa di *Philiphine Internationnal Convention Center (PICC)*. Dihadiri oleh delegasi negara-negara ASEAN dan Uni Eropa termasuk Indonesia. Kesempatan ini kembali dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menyinggung permasalahan diskriminasi minyak kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Kali ini disampaikan oleh Presiden Indonesia periode 2014-2019 Presiden Joko Widodo dalam kesempatan pidatonya.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Industri kelapa sawit sangat membantu perekonomian negara-negara produsen, mengetas kemiskinan, membantu mempersempit gap pembangunan, serta pembangunan yang Inklusif. Oleh karena itu, dalam pidatonya Presiden Jokowi meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan

kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.¹⁸ Citra yang ditimbulkan oleh kebijakan yang diskriminatif dianggap akan merusak dari sektor minyak kelapa sawit tersebut, terlebih berarti merusak ekonomi negara-negara produsen.

Selain di Forum resmi Internasional, Indonesia mengupayakan kampanye secara langsung dilakukan di Indonesia. Forum yang Indonesia laksanakan berupa pelatihan tentang industri kelapa sawit bernama *Oil Palm Course 2017*. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu bekerja sama dengan tim Collaborative Research Center 990 (CRC990) yang terdiri dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Jambi, Universitas Tadulako dan Goettingen University Jerman. Berbagai Universitas baik dalam negeri maupun luar negeri tergabung dalam kegiatan ini, dengan tujuan mensosialisasikan kelapa sawit bahkan ditingkat akademisi.

B. Menghimpun dukungan dari Negara lain

Resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* yang dikeluarkan oleh Uni-Eropa tidak hanya menyinggung Indonesia. Namun berdampak pada negara-negara produsen minyak kelapa sawit lainnya. Sehingga perlunya kerjasama antara negara produsen minyak kelapa sawit agar memperkuat argument untuk menolak resolusi tersebut. Upaya ini Indonesia lakukan untuk mengajak para kelapa sawit. Selain diajak bergabung dalam berbagai kegiatan kampanye positif

18 Presiden Jokowi minta Diskriminasi Kelapa Sawit dihentikan. 14 November 2017. Dimuat dilaman <http://ksp.go.id/presiden-jokowi-minta-diskriminasi-kelapa-sawit-dihentikan/index.html> diakses pada 30 Juni 2018

dinegara-negara Eropa tindakan langsung diperlukan kerjasama yang baik antar negara penghasil melalui kelembagaan dan diskusi resmi.

Indonesia dan Malaysia adalah negara-negara produsen minyak kelapa sawit dunia. Kedua negara ini merasa sangat terganggu dengan adanya resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* yang dikeluarkan oleh Uni-Eropa. *Crude Palm Oil Producing Country*(CPOPC) adalah sebuah organisasi negara-negara penghasil minyak kelapa sawit. Organisasi ini dibuat atas pemikiran dari Indonesia dan Malaysia yang merupakan produsen utama minyak kelapa sawit. Organisasi ini terus bergerak untuk menghimpun negara-negara penghasil minyak kelapa sawit lainnya guna tetap menjadikan minyak kelapa sawit berjaya di *International Market*.

Praktiknya CPOPC selalu hadir dalam berbagai forum Intenasional untuk meluruskan mengenai minyak kelapa sawit. Seperti pada KTT ASEAN-Uni Eropa pernyataan tegas disampaikan oleh Indonesia dan Malaysia. Pengarahan dilakukan oleh Direktur Eksekutif Persatuan negara-negara penghasil minyak kelapa sawit atau *Council Palm Oil Producing Country*(CPOPC) Mahendra Silegar dan didukung kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) kemenlu, Siswo Pramono.¹⁹ Dengan kerjasama keduanya posisi negara-negara penghasil semakin kuat dan terarah dan terskruktur. Selanjutnya Indonesia dan Malaysia mengajak negara-negara penghasil saling membantu dan bekerjasama.

Indonesia yang merupakan produsen minyak kelapa sawit melakukan berbagai pendekatan. Pendekatan diawali secara kelembagaan antara Indonesia dan Uni-Eropa, Indonesia secara tegas telah

19 Presiden RI : Lawan Kampanye Hitam Sawit oleh Eropa. 4 Desember 2017. Dimuat dilaman <https://gapki.id/news/3691/presiden-ri-lawan-kampanye-hitam-sawit-oleh-eropa> diakses pada 28 Juni 2018

menyampaikan sikap terkait Resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri telah melakukan pendekatan secara resmi melalui surat Menlu RI kepada Federica Mogherini dan para Menlu negara-negara anggota UE serta pendekatan yang dilakukan di Jakarta maupun di Brussel kepada semua pemangku kepentingan di tiga institusi Uni Eropa.²⁰ Menyurati adalah salah satu cara menyampaikan sikap secara tegas terhadap Resolusi tersebut. Indonesia mengupayakan untuk menyampaikan secara gamblang bentuk penolakan terhadap Resolusi tersebut.

Indonesia sebagai produsen utama melakukan tindakan untuk mengkoordinasikan mengenai sikap negara-negara produsen kelapa sawit. Melalui KBRI Brussel, Indonesia telah mengkoordinasikan sikap dan langkah bersama yang perlu dilakukan semua negara-negara produsen sawit baik dari Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, dan Afrika dalam menyikapi usulan tersebut.²¹ Sikap dan langkah tersebut dikeluarkan secara bersamaan kepada lembaga-lembaga kepentingan Uni-Eropa.

Sebagai langkah awal negara-negara tersebut menyepakati untuk mengirimkan surat kepada Parlemen Eropa, Komisi Eropa, Dewan Eropa dan lembaga-lembaga berkaitan di Uni-Eropa. Dengan mengajak seluruh negara-negara

produsen kelapa sawit Indonesia memastikan bahwa sikap dan posisi seluruh negara produsen didengar dan didukung oleh Uni-Eropa. Selain menyampaikan sikap dan argumentasi yang menolak tegas usulan PE tersebut, surat bersama juga meminta agar negara produsen sawit disertakan dalam proses pengambilan keputusan UE dalam semangat dialog, prinsip kesetaraan, keadilan dan fairness.²² Dengan menyertakan negara produsen kelapa sawit, negara produsen minyak kelapa sawit dapat memberikan pandangan dan sikap terhadap pandangan yang salah dari Uni Eropa.

III. Kesimpulan

Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi industri minyak kelapa sawit yang sangat besar. Perkebunan minyak kelapa sawit Indonesia tersebar di 190 Kabupaten hingga pelosok daerah. Perkebunan ini tidak hanya milik para pengusaha besar bahkan kelapa sawit merupakan perkebunan individu masyarakat yang menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Penggunaan minyak kelapa sawit dilakukan diberbagai bidang, termasuk dibidang energi. Minyak kelapa sawit dijadikan sebagai pengganti atau alternatif dari bahan bakar fosil, hal ini telah diterapkan dinegara-negara seperti Uni Eropa. Sehingga minyak kelapa sawit menjadi sebuah kebutuhan bagi negara – negara tersebut dibidang energi.

Tindakan diskriminatif terus terjadi hingga Parlemen Uni Eropa mengeluarkan sebuah resolusi bertajuk *Palm Oil and Deforestation of rainforest* pada 4 April

20 Kementerian luar negeri Republik Indonesia. *Tujuh Negara Sikapi Usulan Penghentian Biofuel Kelapa Sawit*. 19 Februari 2018 dimuat dilaman <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/SURAT-BERSAMA-TUJUH-NEGARA-PRODUSEN-SAWIT-MENYIKAPI-USULAN-PARLEMEN-EROPA-UNTUK-PHASING-OUT-PALM-OIL--BASED-BIOFUEL-PADA-2021.aspx> diakses pada 25 Juni 2018

21 Bantolo. *Negara Produsen Sawit Menolak Kebijakan Parlemen Eropa*. 18 Februari 2018 dimuat dilaman <https://www.agrofarm.co.id/5091-2/> diakses pada 30 Juni 2018

22 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Tujuh Negara Sikapi Usulan Penghentian Biofuel Kelapa Sawit*. 19 Februari 2018. Dimuat dilaman <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/SURAT-BERSAMA-TUJUH-NEGARA-PRODUSEN-SAWIT-MENYIKAPI-USULAN-PARLEMEN-EROPA-UNTUK-PHASING-OUT-PALM-OIL--BASED-BIOFUEL-PADA-2021.aspx> diakses pada 30 Juni 2018

2017. Dalam resolusi tersebut Parlemen Uni Eropa merekomendasikan kepada badan eksekutif Uni Eropa untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku Biofuel karena Industri minyak kelapa sawit menyebabkan Deforestasi.

Sehingga pemakaian minyak kelapa sawit mendukung deforestasi, sedangkan faktanya minyak kelapa sawit adalah yang paling efektif dan sedikit menggunakan lahan apabila dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Indonesia terus berupaya melakukan dialog dengan Uni Eropa dengan berbagai tingkatan. Dialog dengan pemangku kepentingan di Uni Eropa, kampanye positif diberbagai negara baik di Indonesia maupun negara-negara Uni Eropa. Indonesia juga terus menekan Uni Eropa diberbagai forum Internasional mengenai minyak kelapa sawit. tidak ketinggalan segala elemen baik perwakilan Indonesia di Brussels, Belgia atau Indonesia terus bersama-sama mengkampanyekan dan memberikan fakta kepada Uni Eropa.

Selain Indonesia, Negara-negara produsen minyak kelapa sawit lainnya diajak bersatu menyatakan sikap kepada Uni Eropa. Hal ini dilakukan dengan menghadiri dan membentuk forum secara bersama dan menyurati pihak Uni Eropa secara bersama pula. Dalam Praktiknya Indonesia melakukan dua strategi yakni melakukan Kampanye Positif terhadap Uni Eropa tentang minyak kelapa sawit serta menghimpun dukungan dari berbagai negara untuk bersama melawan resolusi tersebut. Upaya ini dilakukan secara bertahap dan partisipasi berbagai pihak di Indonesia maupun perwakilan dinegara-negara Uni-Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

Novelli, Emanuelle. *Sustainability as a Success Factor for Palm Oil Producers Supplying the European Vegetable Oil Markets*. OIL PALM INDUSTRY ECONOMIC JOURNAL VOL. 16 (1)

MARCH 2016. http://www.meo-carbon.com/wp-content/uploads/GRAS_OPIEJ_291116.pdf

Tanggapan atas Resolusi Parlemen eropa tentang Minyak sawit. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Tanggapan-Atas-Resolusi-Parlemen-Eropa-Tentang-Minyak-Sawit-.aspx>

BKSAP Serukan Parlemen Uni Eropa Tinjau Ulang Resolusi Sawit. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16522/t/BKSAP+Serukan+Parlemen+Uni+Eropa+tinjau+ulang+Resolusi+Sawit>

Victor Baron, Alain Rival And Raphael Marichal. *No, palm oil is not responsible for 40% of global deforestation.* <https://phys.org/news/2017-06-palm-oil-responsible-global-deforestation.html>

Gumelar, Galih. *Resolusi Sawit Uni-Eropa disinyalir persaingan dagang.* <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170509135906-92-213466/resolusi-sawit-uni-eropa-disinyalir-karena-persaingan-dagang>

Alasan kenapa minyak kelapa sawit tidak bisa dilarang di Uni Eropa. http://www.bpdp.or.id/article-Ini_Alasan_Mengapa_Sawit_Tak_Bisa_Dilarang_di_Eropa.html

Sadewo, Joko. CPOPC : Uni Eropa Diskriminatif soal sawit Indonesia. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/11/29/p06ah2318-cpopc-uni-eropa-diskriminatif-soal-sawit-indonesia>

PASPI. *Industri nyak sawit Indonesia Menciptakan pendapatan Dunia lebih dari USD \$100 Miliar pertahun.* Vol.1 no.7 tahun 2015. <http://paspimonitor.or.id/monitor-archives/>

- Dunia Industri. *Data perkebunan sawit dan industri hilir terbesar didunia*. <http://duniaindustri.com/downloads/data-perkebunan-sawit-dan-produsen-hilir-terbesar-dunia/>
- GAPKI. *INDUSTRI MINYAK SAWIT INDONESIA MENUJU 100 TAHUN NKRI*. 2014. Dimuat di <https://gapki.id>
- Forest Watch Indonesia. *Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia [KERTAS POSISI]*. <http://fwi.or.id/publikasi/industri-kelapa-sawit-berkelanjutan-indonesia/>
- Bahuet Christophe. *Sustainable Palm Oil for All*. 20 juni 2017. <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2017/06/20/sustainable-palm-oil-for-all.html>
- ISPO mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. <http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-479-ispo-mewujudkan-pembangunan-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan.html>
- European Parliament. *Palm oil: the high cost of cultivating the cheap vegetable oil*. <http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170306STO65231/palm-oil-the-high-cost-of-cultivating-the-cheap-vegetable-oil>
- Co-Chairs' Press Release ASEAN-EU Senior Officials' Meeting, 5-6 July 2017, Bangkok. https://eeas.europa.eu/delegations/haiti/29521/co-chairs-%E2%80%99-press-release-asean-eu-senior-officials%E2%80%99-meeting-5-6-july-2017-bangkok_en
- Melawan Kampanye Negatif Palm Oil di Forum Perdagangan Internasional WTO, Jenewa-Swiss. 2 Oktober 2017. <http://missionindonesia.org/2017/10/02/melawan-kampanye-negatif-palm-oil-di-forum-perdagangan-internasional/>
- Mohtar Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Displindan Metodologi*. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES Indonesia.
- Presiden Jokowi minta Diskriminasi Kelapa Sawit dihentikan. <http://ksp.go.id/presiden-jokowi-minta-diskriminasi-kelapa-sawit-dihentikan/index.html>
- Presiden RI : Lawan Kampanye Hitam Sawit oleh Eropa. 4 Desember 2017. <https://gapki.id/news/3691/presiden-ri-lawan-kampanye-hitam-sawit-oleh-eropa>
- Bantolo. Negara Produsen Sawit Menolak Kebijakan Parlemen Eropa. 18 Februari 2018. <https://www.agrofarm.co.id/5091-2/>
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. *Tujuh Negara Sikapi Usulan Penghentian Biofuel Kelapa Sawit*. 19 Februari 2018. Dimuat dilaman <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/>